

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

**(Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan
Way Tuba Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**YEYEN ZULAIHA
NPM.1721030458**

Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
(Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan
Way Tuba Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**YEYEN ZULAIHA
NPM.1721030458
Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi)**



Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dari hal tersebut kemudian pemerintah kampung Karya Jaya mendirikan BUMKam yang diharapkan mampu membantu mensejahterakan masyarakat. Begitupun yang terjadi dalam praktik kerjasama pada Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Badan Usaha Milik Kampung ini dibentuk pada tahun 2017. Jenis usaha yang didirikan pada usaha ini adalah perternakan kambing. Pemilik usaha memberikan modal usaha nya kepada pengelola untuk dijadikan usaha perternak kambing. Pada akad diawal perjanjian yang disepakati pemilik usaha dan pengelola yaitu pembagian hasil 50:50 dan pengelola modal tidak dibebankan tanggungan pembiayaan apapun terkecuali tenaga dan keahlian pengelola, Namun dalam praktiknya adalah terjadinya ketidakadilan dalam suatu akad diawal, dimana pembagian hasil 50:50 menjadi 60:40 begitupun pemilik usaha yang mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pengelola modal dengan dibebankan tanggungan pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *Field research* sedangkan untuk sifatnya penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data informasi secara aktual dan terperinci untuk menggambarkan suatu gejala yang ada sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam peneltia ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Kemudian semua data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan praktik kerjasama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik kampung yang ditinjau secara hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengalihan atas pembayaran yang seharusnya tidak dibebankan oleh pengelola modal. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal tentang mengalihkan hak dan kewajiban akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga pengelola modal merasa terdzalimi dengan apa yang dilakukan oleh pemilik modal. Menurut hukum Islam pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan.


SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeyen Zulaiha
NPM : 1721030458
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG”** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis,

Yeyen Zulaiha
1721030458





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK KAMPUNG (Studi pada Kampung
Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way
Kanan)**

**Nama : Yeyen Zulaiha
NPM : 1721030458
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Sayariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP.196806241997031003

Pembimbing II

Fathul Mu'in, M.H.I.

NIP.198505102020121007

**Mengetahui Ketua
Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suragtmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (Studi pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh : **Yeyen Zalaifa, NPM 1721030458, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Penguji III : Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui Dekan
Fakultas Syariah**

Dr. H. Khoiruddin, M.H.

NIP.19621022199303100

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

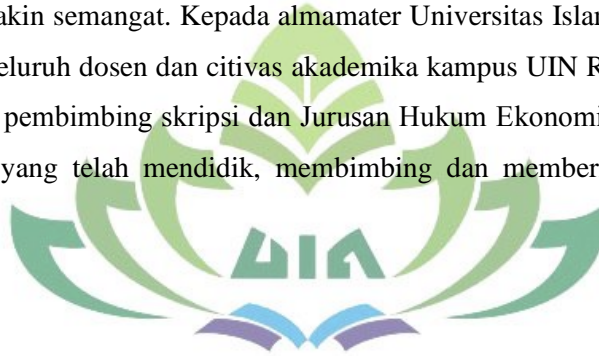
(QS. An-nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

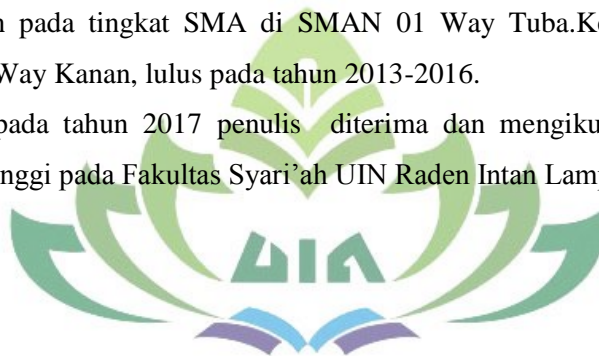
Puji syukur kehadiran Allah swt, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu tercinta (Sugito dan Tri Sutiti) yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakak ku (Antika Maya Evi Ani) tersayang yang selalu menyemangati ku dan mendukungku serta memberikan doa untuk keberhasilan ku, dan untuk Adek ku (Narendra Fairuz Akbar) tersayang yang membuatku semakin semangat. Kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta seluruh dosen dan civitas akademika kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama kepada pembimbing skripsi dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.



RIWAYAT HIDUP

Yeyen Zulaiha, dilahirkan di Karya Jaya pada tanggal 19 Juli 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Sugito dan Ibu Tri Sutiti. Yeyen Zulaiha memiliki saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan yang bernama Antika Maya Evi Ani dan adik laki-laki saya bernama Narendra Fairuz Akbar, adapun pendidikannya adalah sebagai berikut:

1. Mulai dari TK Darma Wanita di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan selesai pada tahun 2003-2004.
2. Kemudian melanjutkan pada tingkat SD di SDN 03 Bravo, kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan selesai pada tahun 2004-2010.
3. Lalu melanjutkan ke SMP di SMPN 04 Way Tuba, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, selesai pada tahun 2010-2013.
4. Melanjutkan pada tingkat SMA di SMAN 01 Way Tuba. Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2013-2016.
5. Kemudian pada tahun 2017 penulis diterima dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung
Membuat

Yeyen Zulaiha
NPM.1721030458

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi pada Kampung Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan)” dapat terselesaikan. Shalawat berserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*muamalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I yang senantiasa membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelolanya yang telah memeberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan Muamalah C yang turut memberikan dukungan.

9. Teman-teman KKN Kampung Karya Jaya yang telah memberikan banyak pengalaman.
10. Teman-teman PPS kelompok 20 yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ummi Kultsum, Siti Masruroh Turohmah dan Muhammad Fauzi, sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi untuk para pembaca, Amiin. Demi memperbaiki hasil penelitian ini selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dengan senang hati penulis akan menerimanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah. Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.



Bandar Lampung
Yang membuat,

Yeyen Zulaiha
NPM.1721030458

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung	16
2. Tujuan Badan Usaha Milik Kampung.....	19
3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Kampung	21
4. Prinsip dalam Mengelola Badan Usaha Milik Kampung	23
5. Keuangan Badan Usaha Milik Kampung	26
6. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung	28

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	32
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	34

5. Hak-Hak dan Kewajiban dalam <i>Mudharabah</i>	36
6. Ketentuan-ketentuan dalam <i>Mudharabah</i>	37
7. Hal-Hal yang Dilarang dalam <i>Mudharabah</i>	37
8. Batal atau Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	38
9. Prinsip-Prinsip dalam <i>Mudharabah</i>	38
10. Hikmah <i>Mudharabah</i>	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Karya Jaya.....	42
1. Sejarah Kampung Karya Jaya.....	42
2. Letak Geografi dan Jumlah Penduduk.....	42
3. Struktur Kampung Karya Jaya.....	47
B. Pelaksanaan Praktik Kerjasama dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.....	48
C. Akad Kerjasama Badan Usaha Milik Kampung dengan Pengelola.....	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Kerjasama dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	45
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	46
Tabel 4 umlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut.....	47
Tabel 5 Struktur Kampung Karya Jaya	47
Table 6 Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Kampung.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Penelitian dari Badan Usaha Milik
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Provinsi Lampung
- Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian dari Kampung Karya Jaya
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 5 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 6 : Blangko Konsultasi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan ke keliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Study Pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan". Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi serta Ijtihad para Ulama' yang mengatur mengenai praktik *mu'amalah*.²
3. Praktik, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan secara nyata yang disebut dalam teori.³
4. Kerja sama, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang tau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2010, 85.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 756.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 218.

5. Pengelola, pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah; dalam mazhab Syafi’I disebut amil. Pengelola merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam praktik mudharabah. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pihak bank bisa bertindak selaku pengelola ketika melakukan penghimpunan dana, atau pihak nasabah bertindak selaku pengelola ketika mengelola dana dari bank (entrepreneur).⁵
6. Badan Usaha Milik Kampung, lembaga usaha kampung yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan pengertian komponen kata -kata dalam judul skripsi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia hidup secara timbal balik dengan sesama makhluk hidup lainnya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Artinya, bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya interaksi sesama. Manusia memiliki sifat ketergantungan dengan segala aspek kehidupan terutama dalam hal kontrak dan perjanjian. Sifat ketergantungan itulah yang membuat manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam hal kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat meliputi beberapa hal bentuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.⁶

Kerjasama dalam agama Islam salah satunya yaitu berupa, akad mudharabah.

Mudharabah sendiri diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang dimana modal

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 529.

⁶ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104.

berasal dari pihak pemilik dana/modal saja dan pihak lain (pengelola dana modal/*mudarib*) berkewajiban untuk mengelola dana modal sekaligus mengurus segala apa yang dibutuhkan dalam kerjasama itu tanpa ikut memberikan modal sedikitpun dalam usaha tersebut. Dalam hal ini, pemilik modal dana boleh memberikan arahan manajemen selama tidak merugikan pekerja. Sedangkan pengelola dana berkewajiban memegang amanah yang disepakati dalam kontrak kerjanya.⁷ Jenis dari *mudarabah* itu digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu *mudarabah mutlaqah*, *mudarabah muqayyadah*, dan *mudarabah musytarakah*.⁸ Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama adalah berdasarkan Al-Qur'an, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. AN-Nisa [4]:29)

Al-Qur'an dan hadis maupun sumber hukum Islam yang lainnya sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memilih suatubadan usaha yang berguna untuk memahami kebutuhan masyarakat terutama

⁷ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 229.

kebutuhan pokok dan terseainya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak ekonomi masyarakat. Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang modalnya 51% dari desa dan 49% dari masyarakat. Hal yang menarik dalam penelitian ini terdapat di Badan Usaha Milik Kampung yang ada di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan yang merupakan sebab adanya permasalahan dalam penelitian ini bahwa telah terjadi permasalahan mengenai kerjasama dalam hal. Pertama adanya ketidaksesuaian dalam suatu akad di awal yang mengakibatkan ketidakadilan dalam bekerjasama. Kedua yaitu terjadinya pengalihan hak dan kewajiban antara sebelah pihak, di awal perjanjian pengelola modal tidak dibebankan apapun selain dari mengelola usaha, namun pada tahun 2018 pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pengelola. Tetapi, pengalihan tersebut tidak diketahui oleh pengelola. Sehingga pengelola merasa dirugikan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah secara mendalam bagaimana Praktik kerjasama dalam pengelola Badan Usaha Milik Kampung. Berdasarkan latar belakang diatas penulis termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung".

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari sesuatu yang baru, dalam sebuah penelitian penelitian peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan diterapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terletak pada praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan badan usaha milik kampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam pengelolaan badan usaha milik kampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

Kerjasama Dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung (Studi Pada Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan) dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Sebagai meningkatkan wawasan pengetahuan ilmu bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu khususnya mengenai Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung. Sebagai pengembangan kajian pola berfikir dalam rangka praktik kerjasama secara Islami, dan bisa menambahkan hasil penelitian baru bagi civitas akademik fakultas syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*muamalah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

b. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi pengembangan keilmuan agama Islam khususnya yang mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam tinjauan hukum Islam. Mengimplementasikan akad sesuai dengan konsep, dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dengan ilmu di fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis, banyak sekali karya ilmiah, artikel, maupun jurnal yang membahas tentang praktik kerjasama yang terjadi dimasyarakat ataupun tentang mudharabah sebagai bahan perbandingan. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka yang bertujuan

untuk sebagai bukti bahwa penulis telah memahami literature masalah yang sedang diteliti.

1. Linda Silviana, tahun 2020 UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay studi pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung.⁹ Dalam skripsinya Linda Silviana melakukan tinjauan pustaka menggunakan teori praktik kerjasama dalam Islam. Lalu untuk metode penelitiannya yang digunakan saudari Linda Silviana yaitu menggunakan metode Field Research untuk mencari kebenaran yang terjadi di lapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskriptifkan objek yang sedang diteliti dan kemudian menggunakan analisis data kualitatif.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian saudari Linda Silviana diketahui bahwa penjualan produk melalui aplikasi gopay tersebut bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung dengan sistem bahwa keuntungan yang didapatkan adalah sesuai kesepakatan diawal perjanjian yaitu dari pihak Alfamart sebesar 70% dan untuk pihak gopay itu sendiri mendapatkan keuntungan 30% .
2. Zeliana Tri Utari tahun 2020 UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil studi Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Group 1 Sukabumi, Bandar Lampung. Dalam skripsinya, saudari Zeliana Tri Utami, kajian teori yang digunakan dalam teorinya yaitu *ijarah* dan *mudharabah* sedangkan untuk metode yang dilakukannya adalah field research dan sifat penelitian yang digunakan oleh

⁹ Linda Silviana “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay Studi Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung*” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2020).

¹⁰*Ibid*, 12

saudari Zeliana Tri Utami yaitu deskripsif analisis untuk menggambarkan bagaimana pengupahan yang terjadi di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Group 1.¹¹ Namun berdasarkan hasil dari penelitian Zeliana Tri Utami tentang pengupahan dengan sistem bagi hasil tersebut tidak sesuai karena karyawan tidak ditentukan gaji setiap perbulannya. Sedangkan didalam hukum Islam penetapan pengupahan seseorang ditentukan dalam perjanjian awal atau awal akad. namun pada praktiknya karyawan hanya digaji perbulan dengan menggunakan akad bagi hasil saja. Jadi praktik dalam pengupahan gaji karyawan belum memenuhi syarat ijarah seperti upah gaji karyawan yang belum jelas didapatkannya dan dapat merugikan dari salah satu pihak sedangkan didalam hukum Islam pengupahan tidak boleh merugikan antara salah satu pihak.

3. Melinda tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola studi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.¹² Dalam skripsi saudari Melinda, kajian teori menggunakan sistem mudharabah dengan metode yang digunakan adalah field research dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis suatu kejadian yang terjadi di Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung. Berdasarkan hasil dari penelitian saudari Melinda tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola terdapat penyimpangan dari ketentuan diperjanjian awal. Perjanjian diawal tidak disebutkan bahwa perubahan

¹¹Zeliana Tri Utami “*Tinjauan Hukum Islam Tentag Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Studi Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Group 1 Sukabumi, Bandar Lampung*” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

¹² Melinda “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Studi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019)

kewajiban shahibul maal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban mudharib. Maka Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang yaitu tidak memenuhi syariat Islam dan ketentuan Islam.

Persamaan kajian penelitian yang telah dikaji oleh penulis kajian terdahulu, penulis menemukan kaitan kajian teori yang sama dengan skripsi saudari Linda Silviana, Zeliana Tri Utami dan Melinda yaitu tentang kerjasama yang dilakukan dengan sistem mudharabah. Teori-teori yang digunakan memberikan penjelasan mengenai akad mudharabah yang sesuai dengan kerjasama bagi hasil. Teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori yang digunakan oleh Linda Silviani, dan Melinda. Meskipun telah disebutkan adanya kemiripan antara judul dan teori, akan tetapi penelitian yang peneliti sedang lakukan saat ini melihat dari tempat penelitian yang berbeda, subjek dan juga objeknya. Maka peneliti tetap tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi Pada Kampung Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kualitatif dengan pendekatan deduktif. Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif lebih relevan dengan mengelolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis, adapun langkah langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah peneliti lapangan (*field research*). *Field research*, yaitu pencarian data secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Penelitian dilakukan langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneliti dari penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Penelitian bertindak sebagai yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan empirik sosiologi dimana pendekatan ini dirasa sesuai dengan keadaan lapangan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini guna untuk mempermudah peneliti membaur dengan subjek penelitian guna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.¹³

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin suatu yang menjadi objek masalah, gejala atau suatu kelompok tertentu. Data yang dikumpulkan berupa gambaran, dan bukan angka-angka.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013), 5.

¹⁴ *Ibid*, 6 .

2. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek berasal dari sumber pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara.¹⁶ Sumber data primer ini berupa catatan dari hasil wawancara yang diperoleh dari proses wawancara terhadap informan atau pun responden dari pemilik badan usaha milik kampung dan pengelola di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Selain itu penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data-data dalam bentuk catatan mengenai situasi kejadian lapangan.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak memberikan informasi secara langsung atau melalui dari pihak lain dengan sumber memuat yang berhubungan dengan informasi tentang penelitian di atas tentang praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung. Data sekunder peneliti dapatkan dari Al-qur'an, Al hadist, buku, jurnal, artikel, majalah dan internet yang mempunyai relevansi dan data-data BUMKm serta arsip

¹⁵ Bader Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: MandarMaju, 2008), 88.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

¹⁷ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 225.

kampung Karya Jaya tahun 2021 dan dipahami dengan membaca, menelaah, mencatat yang sesuai dengan bahan permasalahan yang dibahas, kemudian disaring dan di tuangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian yaitu terhadap praktik kerjasama dalam pengelola badan usaha milik kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Populasi dalam penelitian ini ada 6 orang terdiri dari 1 pemilik modal, 1 pengelola modal, dan 4 pengurus Badan Usaha Milik Kampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel di gunakan untuk purposive sampling yang telah ditentukan berdasarkan dalam beberapa pertimbangan.¹⁸ Pada penelitian ini yang di jadikan sampel yaitu Pemilik modal Badan Usaha Milik Kampung dan Pengelola di Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah serangkaian kegiatan tindakan dengan tujuan mengabadikan objek ataupun subjek. Hasil dokumentasi tersebut adalah dengan dokumen data berupa teks tertulis, gambar maupun foto yang dapat memberikan bentuk-bentuk data yang empiric dan kongkrit sebagaimana yang terjadi di penelitian lapangan. Namun dokumentasi dapat berupa berupa letak

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cpta, 2010), 173

geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan proses dokumentasi ini maka akan memperkuat adanya objek penelitian guna mencapai tingkat validitas data yang diperlukan.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰ Dan dalam wawancara ini di persiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan memalui *interview guide* (pedoman wawancara).

c. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dengan adanya pengamatan dan peninjauan tersebut penulis dapat mengambil data-data lapangan seperti field research terhadap masalah-masalah yang ada.²¹ Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan melihat praktik kerjasama Badan Usaha Milik Kampung.

5. Metodologi Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti lakukan

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 15.

²⁰ Cholid Nurbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet.8, 2007),

²¹ *Ibid.*

adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.²²

b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran. Penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukan kelompok atau golongan tertentu atau klarifikasi berdasarkan jenisnya.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematasi Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui penelitian pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis sedangkan metode analisa.²⁴ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Studi Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupten Way Kanan. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yang disusun secara bertahap dan berlapis yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁵ Metode ini digunakan dalam membuat

²² Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), 23

²³ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung : Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 15.

²⁴ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosalia Karya, 2001), 3.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelola Badan Usaha Milik Kampung.

I. Sistematika Pembahasan

Bab 1 pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan pembahasan ke bab selanjutnya.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai adanya akad mudharabah didalam suatu pertanjian. Oleh karena itu peneliti menggunakan dua teori yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu teori akad dan teori mudharabah. Selanjutnya Bab III dalam skripsi ini berisikan tentang latar belakang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum objek (sejarah singkat desa, keadaan geografis, dan struktur perangkat desa Karya Jaya) Pelaksanaan Praktik Kerjasama Dalam Pengrlolaan Badan Usaha Milik Kampung dan penyajian fakta dan data penelitian.

Kemudian dilanjutkan Bab IV yang merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian ini dimana peneliti berharap menemukan fatka-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan pada bab III yang terdiri dari 2 sub bab yang pertama tentang teori akad dan yang kedua tentang teori mudharabah. Kemudian bab V yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi dan yang terakhir berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Pengertian BUMKam atau Badan Usaha Milik Kampung menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMKam adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah kampung yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kampung dan masyarakat.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kampung dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan kampung. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung. Hal tersebut berarti pembentukan BUMKam didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan

BUMKam adalah atas prakarsa masyarakat kampung. Dari cara pandangan ini, jika pendapatan asli desa dapat diperuloh dari BUMKam, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah kampung memberikan “goowill” dalam merespon pendirian BUMKam. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berpotensi di perdesaan, BUMKam harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan BUMKam dan kinerja BUMKam mampu memberikan konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan kampung. Disamping itu supaya tidak berkembang system usaha kapitalis diperdesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.²⁶

BUMKam adalah lembaga kampung yang dikelola langsung oleh masyarakat kampung sendiri dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMKam dikelola dari kampung untuk kampung, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang lainnya. dengan adanya BUMKam akan memberikan masyarakat untuk menggali, mengelola, dan memngembangkan potensi sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, serta mampu menjadi sentral kebutuhan masyarakat kampung bahkan akan menjadi wadah buat kampung lain untuk ikut berkembang.²⁷ Hal tersebut berarti pembentukan BUMKam didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Kampung sebagai paya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

²⁶ Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), 16.

²⁷ Herry Kamaroesid, *tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 1.

- a. Pembentukan BUMKam bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat yang menjadi dasar layak pembentukan.
- b. BUMKam merupakan usaha kampung yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah kampung, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah kampung dan masyarakat.
- c. Mekanisme pembentukan BUMKam bersifat *inklusif, deliberative* dan *partisipatoris* artinya BUMKam tidak cukup dibentuk oleh pemerintah kampung, tetapi dibentuk melalui musyawarah kampung yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah kampung juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMKam, seperti halnya rapat dalam koperasi.
- d. Pengelolaan BUMKam bersifat demokratis dan teknokratis.

Pendirian dan pengelolaan badan usaha milik kampung (BUMKam) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif kampung yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.²⁸ BUMKam didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi kampung yang merupakan prakarsa masyarakat kampung. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan buah kemajuan di dalam masyarakat kampung. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMKam mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi UNIBRAW, *buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDES*. (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007, 32.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Kampung

Terdapat empat tujuan utama mendirikan BUMKam yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian Kampung
- b. Meningkatkan Pendapatan Kampung
- c. Mendorong berkembang usaha mikro sector informal
- d. Meningkatkan kreaktifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kampung yang berpenghasilan rendah.²⁹

Dalam pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMKam didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan kampung, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi kampung serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Kampung dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMKam akan menjadi usaha kampung yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi kampung. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar kampung) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di kampung disebabkan usaha yang dijalankan BUMKam.

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMKam dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi kampung yaitu:

- a. Kebutuhan masyarakat utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedianya sumber daya kampung yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha milik kampung sebagai asset pergerakan ekonomi masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Keterlibatan pemerintah kampung sebagai penyerta modal besar BUMKam atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (Profeksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luarkampung). Demikian pula pemerintah kampung ikut berperan dalam pembentukan BUMKam sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat kampung.³⁰

Ciri-ciri utama BUMKam dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Modal usaha BUMKam 51% berasal dari desa, dan 49% berasal dari masyarakat.
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh masyarakat.
- c. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (*local wisdom*).

³⁰ Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Perdesaan Untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB Press, 2002), 15.

- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi deas secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan merupaka tenaga kerja potensial yang ada di desa.
- f. Adapun keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat desa.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMKam dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy).
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa;
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMKam diawasi secara bersama (Pemerintah Desa, BPD, anggota.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Kampung

Dasar Hukum BUMKam adalah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- a. Kampung dapat mendirikan badan usaha milik kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung.
- b. Badan usaha milik kampung sebagaimana yng dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan usaha milik kampung sebagaimn dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan .

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Kampung Pengaturan mengenai pendirian BUMKam diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Kampung.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Reoublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Membangun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas

Pembangunan dana Desa Tahun 2017 (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552).

Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Organisasi pengelola BUMKam hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Kampung. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKam terdiri dari: 1) Penasihat. 2) Pelaksana Operasional. 3) Pengawas. Susunan kepengurusan BUMKam dipilih oleh Masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah kampung. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMKam penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Kampung, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

4. Prinsip dalam Mengelola BUMKam

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya: a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; c. Mendapat pembinaan dari manajemen; d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Pengelolaan BUMKam harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan professional. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMKam:

- a. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMKam harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- b. *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMKam harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKam.
- c. *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMKam harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKam.

Sebelum menentukan jenis usaha BUMKam, perlu dilakukan analisis mengenai potensi kampung serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi kemudian melakukan identifikasi mengenai usaha-usaha yang sudah ataupun yang belum dijalankan oleh masyarakat. Setelah itu, penentuan prioritas usaha yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan indikator-indikator tertentu. Tolak ukur indikator dalam penentuan prioritas usaha BUMKam di antaranya budaya, kebutuhan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, modal dan daya beli masyarakat. Penilaian indikator tersebut diubah ke dalam bentuk penskoran agar memudahkan penentuan prioritas unit usaha. Apabila ada skor yang sama maka penentuan peringkat berdasarkan urutan indikator. Misalnya urutan indikatornya di antaranya adalah budaya, kebutuhan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana, modal, dan daya beli masyarakat. Organisasi pengelola BUMKam hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah

Kampung. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKam terdiri dari: Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Susunan kepengurusan BUMKam dipilih oleh Masyarakat kampung melalui Musyawarah Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kampung Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMKam kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh kepala kampung. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMKam. Pemerintah Kampung mempertanggung-jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKam kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah kampung. Pengelolaan BUMKam harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli kampung. Tujuan pengelolaan BUMKam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di kampung.
- b. Memberdayakan kampung sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADES.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di kampung.

Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMKam telah diatur secara terperinci oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda. Selanjutnya tata cara ini akan dijadikan acuan bagi desa untuk mendirikan BUMKam. Masyarakat dan pemerintah kampung saling bekerja sama untuk memprakarsai pendirian BUMKam melalui forum musyawarah desa/rembug kampung.

5. Keuangan BUMKam

Masalah pengelolaan keuangan dalam BUMKam secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMKam

- a. Pemerintah Desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Pinjaman
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMKam yang berasal dari pemerintah kampung adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Namun dalam Undang-Undang Desa yang diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan, salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pendirian dan pengembangan BUMKam. BUMKam dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMKam 51% adalah berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMKam diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMKam. Jika ini berlaku sejalan,

maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMKam dilakukan setiap akhir periode tahun anggaran. Pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa. Musyawarah desa akan dihadiri oleh elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, serta seluruh pengurus yang ada dalam struktur organisasi BUMKam. Laporan pertanggung jawaban yang dibuat antara lain memuat sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan
- b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan.
- c. Laporan Keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- e. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan ke depan.
- f. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.

Mekanisme dan prosedur pengawasan BUMKam ditentukan dalam AD/ART pada saat pendirian badan usaha. Prosedur pengawasan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dengan kesepakatan masyarakat dan pengurus BUMKam. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan jika dirasa perlu

bisa ditambah dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peran Pemkab/Kota yang berperan sebagai fasilitator usaha BUMKam. Mekanisme pengawasan biasanya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMKam dengan baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

6. Pertanggung jawaban Pelaksanaan BUMKam

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMKam kepada penasehat secara ex-officio dijabat oleh kepala kampung, Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMKam. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKam kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah kampung.³¹

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³² Menurut fiqih *Mudharabah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudari*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi

³¹ Satika Rani, *Peranan dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif ekonomi islam* “Skripsi” Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

³² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Isnaini Pers, 2001), 95

menurut kesepakatan bersama.³³ Secara terminology *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.³⁴ Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usahanya dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Firman Allah yang berkaitan dengan definisi ini adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Q.S Al-Muzammil [73]:20)

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2. Dalam hal terjadinya kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kesalahan atau kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang

³³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 240.

³⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 169.

timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.

3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.³⁵

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua belah pihak untuk menjalankan usaha dimana pihak satu sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian terjadi karena kelalaian dari pihak pelaksana usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapat keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pengelola usaha.³⁶

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur'an, Al-Sunah, Ijma' dan qiyas. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

³⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 123.

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S Al-Baqarah [1]:198)

Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُحْسِنُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu'ah [62]:10)

Pada dasarnya ayat-ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*. Landasan dari Al-Sunnah antara lain sebagai berikut:

Hadis riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن
مجاهه)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a.,” bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, *muqaradhah* dan

mencampur gadung dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah)³⁷

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat. Dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ

“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*”³⁸

Selain itu pensyariatan *Mudharabah* juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *Musaqoh*. Namun demikian, sebagaimana kalangan ulama tidak memaukan *qiyas* sebagai landasan dalam akad *mudharabah*. Sementara dalam konteks Indonesia, *mudharabah* legalitasnya berdasarakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 238-253.³⁹ *Mudharabah* sangat membantu manusia dalam bermuamalah. Manusia ada yang miskin ada yang kaya. Terkadang yang kaya tidak punya keterampilan menjalankan usahanya, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak punya modal. Keduanya bisa bekerja sama melalui *mudharabah*

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Syafi’iyah,⁴⁰ rukun-rukun *Mudharabah* ada enam, yaitu pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul mal*), orang yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang

³⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Darul Akmal: Surabaya, 1432). 136, hadis ke-129

³⁸ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu’* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani), 2005), XIV/359.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 15-154.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 177.

(*mudarib*), Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang, modal atau harta pokok (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba (*al-amal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari seseorang yang memiliki keahlian.

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* tersebut ada tiga, yaitu:

- 1) Shahib al-mal, yaitu pemilik modal
 - 2) Mudharib, yaitu pelaku usaha
 - 3) Akad
- b. Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat- syaratnya adalah:
- 1) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
 - 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
 - 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga atau seperempat.
 - 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal.

- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* terdapat persyaratan-persyaratan maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak menurut al-Syafi’I dan Malik. Namun tidak halnya dengan Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal, yang menyatakan *mudharabah* tersebut sah.⁴¹

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usahanya dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁴²

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Pandangan dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal, para ulama fiqih menggolongkan jenis *mudharabah* menjadi tiga bagian yaitu *mudharabah mutlaqoh* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan), *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu), dan *mudharabah musytarakah* (perpaduan akad *mudharabah* dan *musyarakah*).⁴³

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 140.

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,..... 196.

⁴³ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan *mudharib* yang cakupannya luas dan tidak dibatasi dengan spesifikasi daerah bisnis, jenis usaha dan waktu. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Saleh seing kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari pemilik modal yang memberikan kekuasaan.⁴⁴ Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal tersebut dengan usaha yang menurutnya dapat mendapatkan keuntungan dan bebas dimana saja daerah yang diinginkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* shahibul mal memberikan modalnya kepada *mudharib* agar dipakai dalam usaha yang ditentukan. Dalam menjalankan akad ini pemilik modal meberikan modal kepada pengelola dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana yang akan digunakan dan nisbah bagi hasil berdasarkan perjanjian diawal.⁴⁵

Adapun dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola harus mengikuti syarat-syarat ataupun batasan yang disampaikan oleh pemilik modal. Contoh *mudharib* harus mengerjakan pekerjaan tertentu, di tempat tertentu dan membeli barang pada orang tertentu.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Adapun akad *mudharabah Musytarakah* adalah dimana seorang *mudharib* menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Akad yang disepakati diawal adalah *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana

⁴⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), 163.

⁴⁵ Ruslan Abdul Ghofur, "konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), 496 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>..

(*shahibul mal*), setelah berjalannya suatu usaha dengan pertimbangan tertentu dan disepakatikan dengan pemilik tersebut. Jenis *mudharabah* ini adalah *mudharabah musytarakah* yang merupakan gabungan antara akad *mudharabah* dengan *musyarakah*.⁴⁶

5. Hak dan Kewajiban dalam *Mudharabah*

a. Hak dan kewajiban *shahibul maal* adalah:

- 1) Menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
- 2) Menerima jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan umum.
- 3) Pengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
- 4) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
- 5) Menanggung seluruh kerugian yang tidak dilibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.

b. Hak dan kewajiban *mudharib* adalah:

- 1) Menerima keuntungan tertentu sesuai yang telah disepakati dalam *mudharabah*.
- 2) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*.
- 3) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* dengan kesepakatan dan memperhatikan syariat Islam serta kebiasaan yang berlaku.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 212.

- 4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.⁴⁷

6. Ketentuan- ketentuan dalam *Mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan *mudharabah*, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal tidak dibenarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang kelua dari ketentuan syara'.
- b. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* dalam melakukan pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi *mudharib* tidak diperkenankan mengambil ataupun berhutang dngan menggunakan modal untuk keperluan lain selain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Bagi *mudharib* tidak diperbolehkan membeli barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang sudah disediakan.
- e. Bagi *mudharib* tidak diperbolehkan mengalihkan modal tersebut kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan istilah memindahkan modal untuk akad *mudharabah*.
- f. Bagi *mudharib* tidak diperkenankan mencampur modal dengan harta miliknya.
- g. *Mudharib* hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.⁴⁸

7. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah*

- a. Membelanjakan modal untuk kepentingan sendiri.
- b. Menyedekahkan modal atau barang *Mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal.

⁴⁷ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Cet Pertama, 2010, 352-353.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami*... V/590-592

- c. Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seijin pemilik modal.
- d. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁴⁹

8. Batal atau Berakhirnya *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat batal atau berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Dalam akad *mudharabah* dibatasi oleh waktu, maka *mudharabah* dapat berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Dari salah satu pihak memutuskan memundurkan diri.
- c. Dari salah satu pihak hilang akal atau meninggal dunia.
- d. Usaha yang dilakukan mengalami penurunan atau kerugian yang mengakibatkan habisnya modal atau berkurangnya modal ditangan *mudharib*.
- e. Dalam akad *mudharabah* terjadi batal ketika *shohibul mal* atau *mudharib* murtad.
- f. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- g. Pengelola dana mensia-siakan usahanya dan tidak menjalankan amanahnya.⁵⁰

9. Prinsip-Prinsip dalam *Mudharabah*

a. Modal

Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk uang yang beredar.

Umumnya dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak *mudharabah* tidak diberikan secara kontan.

b. Manajemen

⁴⁹ H.A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 156.

⁵⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 124.

Tugas *mudharib* untuk menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* yaitu dengan mengelola dan mengatur penyimpanan, pemasaran, pembelanjaan maupun penjualan barang dagangan.

c. Masa berlakunya kontrak

Kontrak membuat aturan khusus mengenai batas berlakunya, adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.

d. Jaminan

Investor tidak dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan dengan modal beserta keuntungan.

e. Prinsip bagi hasil

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan bagi setiap pihak. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan melalui tingkatan perbandingan rasio, bukan ditetapkan dari jumlah yang pasti.⁵¹

10. Hikmah Mudharabah

Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karena syariat membolehkan muamalah ini agar masing-masing darikeduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan

⁵¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 105.

kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁵² Jadi hikmah disyari'atkan mudharabah adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur'an Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah [27]:2)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. *Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya mudharabah yang dikehendaki syar'i yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia. Selain itu, mudharabah merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli*

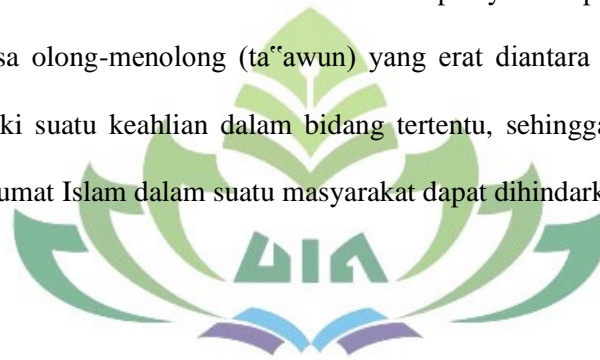
⁵² Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 39.

secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).

Hadits diatas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sepetu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek,dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (khuwah) dan rasa olong-menolong (ta’awun) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2011

Buku:

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo, 2007

Arikunto Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Darul Akmal: Surabaya, 1432

At-Tarusani, safaniah al-Hukkam fi Takhlish al-Khashsham, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk. (Banda Aceh: Pusat Penerbitn dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Book Briefcase, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005

Cholid Nurbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, cet.8, 2007

Damanuri Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi UNIBRAW, *Buku Panduan dan Pendirian BUMDES*, (Jakarta: Pendirian Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN), 2007

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005

Veithzal Riva dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

- Ghazali Abdurrahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2020
- Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian* Bogor : Ghalia Indonesia, 2002
- Hadi Sutrisno, *Metode Reasearch, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2012
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016
- Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ja'far Khumedi, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Lampung : Permatanet Publishing, 2016
- Kamaroesid Herry, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung : Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002
- Mujahidin Ahmad, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syari'ah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013
- Nasution Bader Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: MandarMaju, 2008)
- Nasution Muslimin, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Perdesaan untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB Perss, 2002)

Nurudin Ridwan, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Sejarah Konsep dan Pengembangannya)*, Banda Aceh : 2014

Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017

Sahroni Oni, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016

Salma Barlinti Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet Pertama, 2010

Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003)

Subagyo Jogo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Pratik*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 1994

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Jakarta: DSNMUI, 2000.

Jurnal dan Naskah Ilmiah

Abdul Ghofur Ruslan, “konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015)

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Al Majmu’* (Digital Library, al-Maktabah al-Ishtar al-Tsani, 2005), XIV/359

Linda Selviana “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay Studi Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung*” Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020

Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqiti, *Syarh Zad al-Mustaqna’li al-Syanqiti*, (Digital Library, al-Maktabarah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005), VIII/62

Melinda *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Studi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung”* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019

Rani Sartika *“Peranan dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Zeliana Tri Utami *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Studi Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Group 1 Sukabumi, Bandar Lampung”* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020

Sumber Lainnya

Abdul Ghofur Ruslan, “konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>

Agustianto, “Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah” <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asa-perkembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah..>

Wawancara

Ahmad Widodo, wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Kampung di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 01 Januari 2021

Boimin, wawancara dengan wakil ketua pengawas Badan Usaha Milik Kampung di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 04 Januari 2021

Dewi Andriyani, wawancara dengan Sekretaris Badan Usaha Milik Kampung di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 02 Januari 2021

Giat Hartono, wawancara penulis dengan kepala Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 02 Januari 2021

Indra Nurjaman, wawancara dengan bendahara Badan Usaha Milik Kampung di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 03 Januari 2021

Katijo, wawancara dengan Pengelola Badan Usaha Milik Kampung di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 02 Januari 2021

Rojikin, wawancara dengan ketua pengawas Badan Usaha Milik Kampung di Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 03 Januari 2021

Tangguh Prayitno, wawancara dengan sekretaris Desa Karya Jaya, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, 05 Desember 2021